BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perubahan Guna Lahan

Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda. (Wahyunto et al., 2001).

Alih fungsi lahan pertanian merupakan lahan pertanian yang beralih fungsi dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Dengan kata lain lahan tersebut yang tadinya digunakan untuk kegiatan pertanian beralih fungsi digunakan menjadi kegiatan pembangunan seperti pembangunan pabrik, gedung, perumahan, maupun infrastruktur lainnya (Mustopa, 2011).

Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya adalah peralihan fungsi lahan yang tadinya untuk peruntukan tertentu berubah menjadi peruntukan tertentu pula (yang lain). Dengan perubahan penggunaan lahan tersebut daerah tersebut mengalami perkembangan, terutama adalah perkembangan jumlah sarana dan prasarana fisik baik berupa perekonomian, jalan maupun prasarana yang lain. Dalam perkembangannya perubahan lahan tersebut akan terdistribusi pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai potensi yang baik. Selain distribusi perubahan penggunaan lahan akan mempunyai pola-pola perubahan penggunaan lahan menurut Bintarto (1977) pada distribusi perubahan penggunaan lahan pada dasarnya dikelompokkan menjadi:

- Pola memanjang mengikuti jalan
- Pola memanjang mengikuti sungai
- Pola radial
- Pola tersebar
- Pola memanjang mengikuti garis pantai
- Pola memanjang mengikuti garis pantai dan rel kereta api

T. B Wadji Kamal 1987, yang dikutip oleh Harahap 2010 menjelaskan pengertian perubahan penggunaan lahan yaitu: Perubahan penggunaan lahan yang dimaksud

adalah perubahan penggunaan lahan dari fungsi tertentu, misalnya dari sawah berubah menjadi pemukiman atau tempat usaha, dari sawah kering berubah menjadi sawah irigasi atau yang lainnya. Faktor utama yang mendorong perubahan penggunaan lahan adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga mendorong mereka untuk merubah lahan. Tingginya angka kelahiran dan perpindahan penduduk memberikan pengaruh yang besar pada perubahan penggunaan lahan. Perubahan lahan juga bisa disebabkan adanya kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di suatu wilayah. Selain itu, pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi seperti pembangunan pabrik juga membutuhkan lahan yang besar walaupun tidak diiringi dengan adanya pertumbuhan penduduk disuatu wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi perubahan penggunaan lahan tersebut pada dasarnya adalah topografi dan potensi yang ada di masing-masing daerah dan migrasi penduduk.

2.2 Lahan Pertanian

Pada dasarnya pertanian di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam seperti dilansir dalam bukunya Mubyarto (1972) yang dikutip oleh Mustopa 2011. Yang pertama adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi:

1. Pertanian rakyat atau disebut pertanian dalam arti sempit
2. Perkebunan
3. Kehutanan
4. Peternakan
5. Perikanan.

Yang kedua adalah pertanian dalam arti sempit atau pertanian rakyat yaitu usaha pertanian keluarga dimana diproduksi bahan makanan utama seperti beras, palawija, dan tanaman-tanaman holtikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Kebanyakan para petani di Indonesia masih bersifat subsisten, yang berarti produksi mereka hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum mengarah bagaimana menciptakan keuntungan dari pertanian mereka.

2.3 Tata Guna Lahan

Tata guna lahan (*land use)* adalah pengaturan penggunaan tanah (tata=penganturan). Dalam tata guna lahan dibicarakan bukan saja mengenai

penggunaan permukaan bumi di daratan, tetapi juga menggenai penggunaan permukaan bumi di lautan (Jayadinata, 1999).

2.3.1 Tata Guna Lahan di Wilayah Perkotaan

Tata Guna Lahan Perkotaan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukan pembagian dalam ruang dari peran kota: kawasan, tempat tinggal, kawasan tempat bekerja, dan kawasan rekreasi. Suatu kota umumnya selalu mempunyai rumah-rumah yang mengelompok atau merupakan pemukiman terpusat. Suatu kota yang tidak terencana berkembang dipengaruhi oleh keadaan fisik dan sosial.

Kota yang terletak pada permukaan bumi yang mempunyai berbagai rintangan alam, dalam perkembangannya akan menyesuaikan diri sehingga kota berbentuk tidak teratur. Suatu hal yang khas bagi suatu kota ialah bahwa kita itu umumnya mandiri atau serba lengkap (*self contained*), yang berate penduduk kota bukan hanya yang bertempat tinggal saja di dalam kota itu, tetapi bekerja mencari nafkah di dalam kota itu dan berekreasi pun dilakukan di dalam kota itu. Keadaan ini sangat berlainan dengan keadaan di dalam kampung di wilayah pedesaan, di mana penduduk umumnya harus pergi ke luar kampung untuk mencari nafkah.

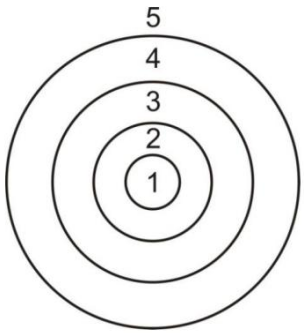
Dengan demikian kota menyediakan segala fasilitas bagi kehidupan baik social maupun ekonomi, sehingga baik bertempat tinggal maupun bekerja dan berekreasi dapat dilakukan oleh penduduk di dalam kota.

2.3.1.1 Pola Tata Guna Lahan Perkotaan

Dalam pola tata guna lahan yang berhubungan dengan nilai ekonomi, terdapat beberapa teori diantaranya:
Teori Jalur Sepusat atau Teori Konsentrik (*Concentric Zone Theory*) B. W. Burgess, mengemukakan bahwa kota terbagi sebagai berikut :

1. Pada lingkaran dalam terletak pusat kota (*central business district atau CBD*) yang terdiri atas: bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar dan toko pusat perbelanjaan;
2. Pada lingkaran tengah pertama terdapat jalur alih: rumah-rumah sewaan, kawasan industri, perumahan buruh;

3. Pada Lingkaran tengah kedua terletak jalur wisma buruh, yakni kawasan perumahan untuk tenaga kerja pabrik;
4. Pada lingkaran luar terdapat jalur wadyawisma, yaitu kawasan perumahan yang luas untuk tenaga kerja halus dan kaum madya (*middle class*);
5. Di luar lingkaran terdapat jalur pendugdag (jalur ulang-alik): sepanjang jalan besar terdapat perumahan masyarakat golongan madya (menengah) dan golongan atas.

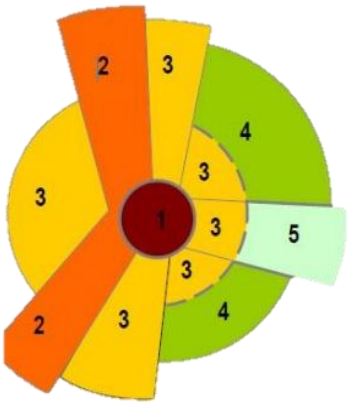


Gambar 2.1

Teori Jalur Terpusat

Teori Sektor (*Sector theory*) menurut Humer Hoyt bahwa kota tersusun sebagai berikut:

1. Pada lingkaran pusat terdapat pusat kota (CBD);
2. Pada sektor tertentu terdapat kawasan industri ringan dan kawasan perdagangan;
3. Merupakan kawasan tempat tinggal kaum buruh;
4. Agak jauh dari pusat kota dan sektor industri serta perdagangan, terletak sektor madyawisma (kaum madya/ kelas menengah)
5. Sektor adiwisma (kawasan tempat tinggal golongan atas).



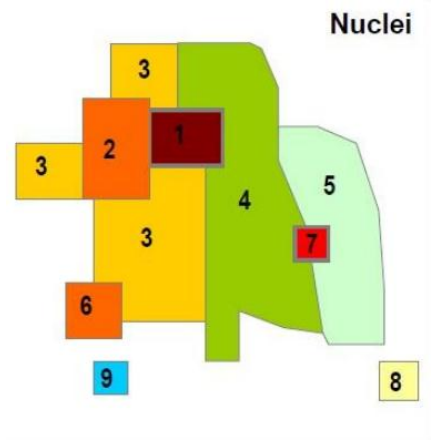
Gambar 2.2

Teori Sektor

Teori Pusat Lipatganda (*Multiple Nuclei Concept*) menurut R. D Mc-Kenzei menerangkan bahwa kota meliputi: pusat kota, kawasan kegiatan ekonomi, kawasan hunian, dan pusat lainnya. Untuk teori ini umumnya berlaku di kota-kota yang agak besar.

Dalam Teori Pusat Lipat ganda (*Multiple Nuclei Concept*) Kota terdiri atas:

1. Pusat kota atau CBD;
2. Kawasan niaga dan industri ringan;
3. Kawasan murbawisma atau tempat tinggal berkualitas rendah;
4. Kawasan madyawisma, tempat tinggal berkualitas sedang/ menengah;
5. Kawasan adiwisma, tempat tinggal berkualitas tinggi;
6. Pusat indutri berat;
7. Pusat niaga/perbelanjaan lain di pinggiran; 20
8. Kawasan golongan menengah dan golongan atas;
9. Kawasan industri (*sub urban*).



Gambar 2.3

Teori Pusat Lipatganda

Sumber: Jayadinata, 1999

2.3.2 Tata Guna Lahan di Wilayah Perdesaan

Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Perda Majalengka, 2011).

Menurut Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa yang dikutip oleh Jayadinata 2011, wilayah pedesaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perbandingan tanah dengan manusia (*man and ratio*) yang besar;
2. Lapangan kerja agraris ;
3. Hubungan penduduk yang akrab;
4. Sifat yang menurut tradisi (*tradisional).*

Wilayah pedesaan, menurut Wibberley yang dikutip oleh Jayadinata 2011 bagian suatu negeri yang memperlihatkan penggunaan tanah yang luas sebagai ciri penentu, baik pada waktu sekarang maupun beberapa waktu yang lampau.

2.3.2.1 Pola Tata Guna Lahan Pedesaan

Penggunaan tanah di wilayah pedesaan adalah untuk perkampungan dalam rangka kegiatan sosial, dan untuk pertanian dalam rangka kegiatan ekonomi. Dengan demikian kampung di pedesaan merupakan tempat kediamaan (*dormitory*

settlement) dan penduduk kampung di wilayah pertanian dan wilayah perikanan umumnya bekerja di luar kampung.

Perkampungan atau permukiman di pedesaan terbagi menjadi dua macam:

1. Permukiman Memusat (*agglomerated rural settlement*)

Permukiman memusat yakni rumahnya mengelompok dan merupakan dukuh atau dusun (*hamlet*) yang terdiri atas kurang dari 40 rumah dan kampung (*village*) yang terdiri atas 40 rumah atau lebih bahkan ratusan rumah. Di sekitar kampung dan dusun terdapat tanah bagi pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, kehutanan, tempat penduduk bekerja sehari-hari untuk mencari nafkahnya.

2. Permukiman Terpencar (*dissenminated rural settlement*)

Permukiman terpencar yakni rumahnya terpencar menyendiri terdapat di Negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan sebagainya.perkampungan terpencar di Negara itu hanya terdiri atas *farmstead,* yaitu sebuah rumah petani yang terpencil tetapi lengkap dengan gudang alat mesin, penggilingan gandunm, lumbung, kandang ternak. Kadang-kadang terdapat homestead yaitu rumah terpencil. Selain itu ada *roadside* yaitu suatu bangunan terpencil di tepi jalan yang merupakan restoran, motel, pompa bensin, dan sebagainya (ada juga di Indonesia), sering dimasukkan ke dalam kelompok permukiman terpencar.

2.4 Tinjauan Pembangunan BIJB Sebagai *Aerocity*

2.4.1. Konsep *Aerocity*

Aerocity adalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas perkotaan yang saling mendukung dengan kegiatan bandar udara (Perda Jabar No 13 Tahun 2010). Konsep *Aerocity/Aerotropolis* adalah Konsep Pengembangan Kota Bandara. Penggagas konsep ini adalah Penggagas istilah *Aerotropolis, John D. Kasarda*, seorang profesor di *University of North Carolinas Kenan-Flagler Business School*, dan Direktur dari *the Kenon Institute of Private Enterprise,* menulis dalam beberapa artikel dan buku, terkait dengan mengapa *Aerotropolis* menjadi sangat penting di abad 21. *Aerotropolis* bandara kota memiliki beberapa konsep sebagai dasar pengembangannya. *Aerotropolis* menjadi generator utama pengembangan kawasan karena merupakan kawasan cepat tumbuh berbasis

bandara atau sering disebut *airport-centric commercial development*. Kawasan ini menciptakan secara mandiri :

1. *significant employment,*
2. *shopping,*
3. *trading,*
4. *business meeting,*
5. *entertainment, and*
6. *leisure destinations,*

Sehingga menjadi kota handal dan menjadi daya tarik global (melalui *airplane network*) dan lokal (melalui multimodal lokal). Evolusi *function* dan *form* ini mentransformasikan secara esensial sejumlah bandara kota (*city airport*) menjadi kota bandara (*airport cities*) (Kasarda, 2008).

Konsep *aerocity* ini diusahakan untuk diterapkan di Indonesia. Daerah yang sedang merintis upaya ini adalah Provinsi Jawa Barat, yakni di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 :

1) Pasal 35, Ayat (1), Butir b.: Kawasan peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h terdiri atas kawasan peruntukkan BIJB dan Kertajati Aerocity.
2) Pasal 35, Ayat (3), Butir a.: Pengembangan BIJB seluas kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) hektar.
3) Pasal 35, Ayat (3), Butir b.: Pengembangan kawasan Kertajati *Aerocity* seluas kurang lebih 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar.
4) Pasal 37: Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi KSP Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*.

2.4.2. Pembangunan BIJB

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat ini selaras dengan usaha akselerasi pencapaian visi Jawa Barat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan struktur perekonomian regional yang tangguh, perlu dilakukan upaya peningkatan infrastruktur wilayah yang dapat menunjang kelancaran aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat di Jawa Barat. Atas dasar inilah pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dinilai penting. Kabupaten Majalengka itu sendiri akan memiliki Kertajati *Aerocity* sebagai pengembangan kawasan pendukung dari Bandara Internasional ini (Irwan, 2013).

Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat yang selanjutnya disebut Kawasan BIJB adalah kawasan yang penataan ruangnya diperuntukkan sebagai Bandara Internasional Jawa Barat dan pendukungnya (Perda Majalengka, 2011).

Lokasi pendirian bandara terletak di Kecamatan Kertajati dengan luas 1800 Ha, hal ini sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 34 tahun 2005. BIJB juga sudah tercantum dalam MP3EI (Masterplan Percepatan Perkembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia), RPJM nasional 2010-2014, dan Perda Nomor 22/2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jabar.

Pembangunan bandara International Jawa Barat yang harusnya memiliki seluruh peran tersebut sebagai standard bandar udara yang layak. Namun, pembangunan BIJB ini tidak memiliki peran dalam point kedua yaitu mengenai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang digambarkan sebagai lokasi dan wilayah di sekitar bandar udara. Pembangunan BIJB ini sangat tidak selaras dengan lokasi dan wilayah di sekitar Bandar udara yang memiliki kehidupan pedesaan yang hanya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian (Dwipoyanthi dan Rasyid, 2012).

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati *Aerocity* di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13 Tahun 2011, di Lokasi dengan peringkat tertinggi yaitu di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Pada Tahun 2005, isu Jawa Barat tersebut dikukuhkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor KM

34 Tahun 2005 tentang Penetapan lokasi Pembangunan BIJB di Kabupaten Majalengka.

Pada Tahun 2012 telah dibebaskan lahan untuk Bandara seluas 718,5 Ha, pada tahun 2013 direncanakan akan dibebaskan lahan seluas 251,5 Ha, pada tahun 2014 sisa lahan yang perlu dibebaskan seluas 830 Ha. Pada awal tahun 2013 sedang dilaksanakan proses lelang, dan direncanakan pembangunan *run way* sepanjang 2.500 M akan dimulai pada bulan juni 2013. Hal ini berdampak pada masalah sosial ekonomi masyarakat, yang perlu segera ditangani secara komprehensif (Rancangan RPJMD, 2014-2018).

2.5 Tingkat Kesiapan

Menurut Slameto (2010) kesiapan adalah keseluruhan yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon". Astiwi, (2012) dalam penelitiannya menyebutkan kesiapan adalah suatu kondisi yang dimiliki baik oleh perorangan maupun suatu badan dalam mempersiapkan diri baik secara mental, maupun fisik untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Aspek-aspek kesiapan yaitu suatu kondisi dikatakan siap setidak-tidaknya mencakup beberapa aspek, menurut Slameto (2010), ada tiga aspek yang mempengaruhi kesiapan yaitu:

1) Kondisi fisik, mental, dan emosional
2) Kebutuhan atau motif tujuan
3) Keterampilan, pengetahuan, dan pengertian yang lain yang telah dipelajari.

Slameto juga mengungkapkan tentang prinsip-prinsip readiness atau kesiapan yaitu:

1) semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi).
2) kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat daripengalaman.
3) pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan.

4) kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan.

Dari beberapa pengertian diatas penulis bisa menyimpulkan kesiapan itu adalah dimana kondisi seseorang siap baik fisik maupun mental dalam menghadapi suatu perubahan. Perubahanya yaitu berupa perubahan kearah yang baik atau perubahan yang mengancam diri seseorang itu dimasa yang akan datang dan dapat menyiapkan dirinya sendiri untuk menghadapi perubahan tersebut.

2.6 Analisis *Cluster*

Analisis *cluster* merupakan suatu teknik analisis multivariat yang bertujuan untuk meng*cluster*kan data observasi ataupun variabel-variabel ke dalam *cluster* sedemikian rupa sehingga masing-masing *cluster* bersifat homogen sesuai dengan faktor yang digunakan untuk melakukan peng*cluster*an. Karena yang diinginkan adalah untuk mendapatkan *cluster* yang sehomogen mungkin, maka yang digunakan sebagai dasar untuk meng*cluster*kan adalah kesamaan skor nilai yang dianalisis. Data mengenai ukuran kesamaan tersebut dapat dianalisis dengan analisis *cluster* sehingga dapat ditentukan siapa yang masuk *cluster* mana (Gudono, 2011).

Tujuan dari analisis *cluster* adalah mengelompokkan obyek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara obyek-obyek tersebut. Dengan demikian, ciri-ciri suatu *cluster* yang baik yaitu mepunyai :

- *Homogenitas internal* (*within cluster*) yaitu kesamaan antar anggota dalam satu *cluster*.
- *Heterogenitas external* (*between cluster*) yaitu perbedaan antara *cluster* yang satu dengan *cluster* yang lain.

Langkah pengelompokan dalam analisis *cluster* mencakup 3 hal berikut :

1. Mengukur kesamaan jarak
2. Membentuk *cluster* secara *hirarkis*
3. Menentukan jumlah *cluster*.

Adapun metode pengelompokan dalam analisis cluster meliputi :

- Metode *Hirarkis*; memulai pengelompokan dengan dua atau lebih obyek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian diteruskan pada obyek yang

lain dan seterusnya hingga *cluster* akan membentuk semacam 'pohon' dimana terdapat tingkatan (hirarki) yang jelas antar obyek, dari yang paling mirip hingga yang paling tidak mirip. Alat yang membantu untuk memperjelas proses hirarki ini disebut "dendogram".

- Metode *Non-Hirarkis*; dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah *cluster* yang diinginkan (dua, tiga, atau yang lain). Setelah jumlah *cluster* ditentukan, maka proses cluster dilakukan dengan tanpa mengikuti proses hirarki. Metode ini biasa disebut "*K-Means Cluster*".

2.7 Penelitian Terdahulu

1. **Judul Artikel/Jurnal : Dinamika Kebijakan Pembangunan di Daerah (Studi Kasus Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka). kebandarudaraan**

   Nama Penulis : Fanny Dwipoyanthi, dan Slamet Rosyad

   Nama Jurnal : Magister Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman, map.unsoed.ac.id/.../Paper-Fanny-dan-Slamet-Rosyadi...

   Tujuan penelitian ini untuk mengetaui kesesuaian antara kebijakan dengan peraturan pemerintah RI No 70 tahun 2001 tentang kebandarudaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *policy analysis* yang menganalisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2001 tentang kebandarudaraan mengenai penetapan lokasi, penguasaan dan penggunaan tanah, perairan serta ruang udara di bandar udara umum terhadap pembangunan bandara internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

   Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah pembangunan BIJB merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan sarana transportasi udara serta peningkatan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Jawa Barat, tetapi jika melihat lebih dalam terhadap permasalahan penetapan lokasi yang dijadikan untuk pembangunan BIJB terlihat jelas bahwa pemerintah daerah tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2001 tentang kebandarudaraan mengenai penetapan lokasi, penguasaan dan penggunaan tanah, perairan serta ruang udara di bandar udara umum. Pembangunan BIJB ini dianggap tidak sesuai dengan pasal 9 ayat 2, yang berbunyi bahwa penetapan luas

tanah dan/atau perairan dan ruang udara harus didasarkan pada penatagunaan tanah dan/atau perairan dan ruang udara yang menjamin keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan dalam bidang lain di kawasan letak bandar udara umum.

Penetapan lokasi pembangunan bandara di Majalengka dianggap tidak tepat. Sebab pemerintah tidak menyelaraskan antara pembangunan bandara dengan kegiatan masyarakat Majalengka yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Pembangunan bandara ini berdampak pada nasib ribuan rakyat di 11 desa. Beralih profesi tidaklah mudah bagi mereka, karena tingkat pendidikan yang rendah. Sebagian warga yang telah tergusur lahannya, memilih jalan pintas menjadi tenaga kerja Indonesia di negara lain. Tentu saja itu bukan hal yang mereka inginkan, karena tidak jarang kepulangan tenaga kerja Indonesia hanya tinggal sebuah nama dan derita pilu bagi keluarga. Penetapan suatu kebijakan pemerintah perlu untuk melibatkan masyarakat didalamnya dan perlu untuk memberikan berbagai masukan serta tindakan terhadap berbagai permasalahan yang ditimbulkan dalam penetapan kebijakan guna mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

2. **Judul Artikel/Jurnal : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010**
   (Studi Empiris pada Kabupaten Nias Selatan)
   Nama Penulis : Hetti Herlina
   Nama Jurnal : ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/.../470
   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintahan daerah Kab. Nias Selatan dalam implementasi PP 71 tahun 2010. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat eksploratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dan studi kasus, hasil analisis data menunjukkan bahwa kesiapan Pemda Kabupaten Nias Selatan dalam mengimplementasikan PP 71 tahun 2010 dipengaruhi oleh faktor informasi, faktor perilaku dan faktor keterampilan. Saran dalam penelitian ini adalah (1). bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan dalam

implementasi PP 71 tahun 2010. (2). Saran untuk peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan dan memperluas lingkup penelitian.

3. **Judul Artikel/Jurnal :** ***Scale Readiness for Organizational Change: The Systematic Development of a scale***

   Nama Penulis : ***Daniel T. Holt, Achilles A. Armenakis, Hubert S. Feild and Stanley G. Harris***

   Nama Jurnal : ***Journal of Applied Behavioral Science 2007; 43; 232, DOI: 10.1177/0021886306295295***

   Penelitian ini menggunakan kerangka *item*-pengembangan sistematis sebagai panduan (yaitu, pengembangan *item*, administrasi kuesioner, pengurangan *item*, evaluasi skala, dan replikasi), Artikel ini membahas pengembangan dan evaluasi instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kesiapan untuk perubahan organisasi pada tingkat individu. Dalam semua, lebih dari 900 anggota organisasi dari sektor publik dan swasta berpartisipasi dalam berbagai fase studi, dengan kuesioner yang diuji dalam dua organisasi yang terpisah. Itu Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan untuk perubahan adalah multidimensi dipengaruhi oleh keyakinan di antara karyawan yang (a) mereka mampu menerapkan perubahan yang diusulkan (yaitu, perubahan *spesifik efficacy*), (b) perubahan yang diusulkan sesuai untuk organisasi (yaitu, kesesuaian), (c) para pemimpin berkomitmen untuk perubahan yang diusulkan (yaitu, dukungan manajemen), dan (d) perubahan yang diusulkan bermanfaat bagi organisasi anggota (yaitu, valensi pribadi).

Tabel 2.1

Matriks Penelitian Terdahulu

No	Judul Jurnal/TA	Permasalahan dan Tujuan	Metode Analisa	Varibel	Hasil/Kesimpulan
1	Dinamika Kebijakan Pembangunan di Daerah (Studi Kasus Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka)	Untuk mengetaui kesesuain antara kebijakan dengan peraturan pemerintah RI No 70 tahun 2001 tentang kebandarudaraan.	Policy analysis	-	Penetapan lokasi pembangunan bandara di Majalengka dianggap tidak tepat. Sebab pemerintah tidak menyelaraskan antara pembangunan bandara dengan kegiatan masyarakat Majalengka yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian
2	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 (Studi Empiris pada Kabupaten Nias Selatan)	Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintahan daerah Kab. Nias Selatan dalam implementasi PP 71 tahun 2010	Analisis faktor dan Studi kasus	• Kesiapan Pemda dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 1) Isi 2) Proses 3) Individu ✓ Komitmen pemimpin ✓ Resistensi terhadap perubahan • Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi suatu Kebijakan	Kesiapan Pemda Kabupaten Nias Selatan dalam mengimplementasikan PP 71 tahun 2010 dipengaruhi oleh faktor informasi, faktor perilaku dan faktor keterampilan

No	Judul Jurnal/TA	Permasalahan dan Tujuan	Metode Analisa	Varibel	Hasil/Kesimpulan
3	*Scale Readiness for Organizational Change: The Systematic Development of a scale*	Pengembangan dan evaluasi instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kesiapan untuk perubahan organisasi pada tingkat individu	Kerangka item-pengembangan sistematis sebagai panduan (yaitu, pengembangan item,administrasi kuesioner, pengurangan item, evaluasi skala, dan replikasi)	• *Appropriatenes* • *Management Support* • *Change Efficacy* • *Personally Beneficial*	Kesiapan untuk perubahan adalah multidimensi dipengaruhi oleh keyakinan di antara karyawan

Tabel 2.2
Matriks Sintesis Penelitian Terdahulu

No	Masalah	Tujuan	Studi Kasus	Metode	Variabel
Jurnal 1	Kesesuaian lahan dengan pp RI No 70 tahun 2001	Untuk mengetahui kesesuain antara kebijakan dengan peraturan pemerintah RI No 70 tahun 2001 tentang kebandarudaraan	Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka	*Policy analysis*	-
Ket					
Jurnal 2	Penerapan PP 71 tahun 2010	Mengetahui dan menganalisis faktor-	Pemerintahan daerah Kab. Nias Selatan	Analisis faktor dan Studi kasus	• Kesiapan Pemda dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010

No	Masalah	Tujuan	Studi Kasus	Metode	Variabel
		faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintahan daerah Kab. Nias Selatan dalam implementasi PP 71 tahun 2010			4) Isi 5) Proses 6) Individu ✓ Komitmen pemimpin ✓ Resistensi terhadap perubahan • Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi suatu Kebijakan
Ket					Resistensi perubahan variabel yang sama dengan TA yang sedang disusun, ini merupakan variabel untuk penilian individu, perbedaanya pada penelitian ini ditanyakan kepada individu pemerintah tetapi TA yang sedang disusun ditanyakan kepada individu masyarakat
Jurnal 3	Perubahan organisasi pada tingkat individu	Pengembangan dan evaluasi instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kesiapan untuk perubahan	Perusahaan	Kerangka item-pengembangan sistematis sebagai panduan (yaitu, pengembangan item,administrasi kuesioner,	• *Appropriatenes* • *Management Support* • *Change Efficacy* • *Personally Beneficial*

No	Masalah	Tujuan	Studi Kasus	Metode	Variabel
		organisasi pada tingkat individu		pengurangan item, evaluasi skala, dan replikasi)	
Ket					Variabel yang sama yaitu : • *Appropriatenes* • *Management Support*

Hasil Analisis, 2015